

THE HISTORY OF FREE ACEH MOVEMENT'S REBELLION (GERAKAN ACEH MERDEKA, GAM) IN ACEH YEAR 1976-2005

Murni Wahyuni*, Isjoni, Bedriati Ibrahim*****

Email: Murniwahyun@gmail.com (085278240371), Isjoni@yahoo.com, Bedriati.ib@gmail.com

History Education Study Program
Faculty Of Teacher Training and Education-University of Riau

***Abstract:** Free Aceh Movement declared by Hasan Tiro in 1976 is a form of frustration caused by the central government that adopts centralism. Not only that, Aceh also support Indonesia's struggle against the Dutch in order to maintain independence. Aceh also contributed a substantial contribution, even called the capital region of the Republic of Indonesia by Soekarno. The purpose of this study was to determine the state of Aceh prior to the uprising Aceh Movement, to determine the causes of the uprising Aceh Movement, to determine the Free Aceh Movement rebellion in 1976-2005, to know what are the government's efforts to quell the rebellion of the Free Aceh Movement and to know the state of Aceh after the holding of the peace agreement. The method used is the historical method in which data are collected through Library Studies, Interviews and Documentation. Analysis of the data using the method of writing history. When the study began filing title until the completion of a revised proposal last essay writer. The results showed that, economic, cultural and disappointment Aceh had been the cause of the rebellion. In a further development deadly unrest mainly civilians. Furthermore, each president has their own way to quell the revolt. The final stage of the insurgency is a peace agreement or memorandum of understanding signed in Helsinki with a long debate agreed by both parties in 2005. In addition, the tsunami disaster also had a hand in this peacekeeping because it is considered as the driving force of the peace plan. Based on these results it can be concluded that the 29-year insurgency in Aceh to achieve justice is expected to be met with the Memorandum of Understanding.*

Keywords: History, Rebellion, Free Aceh Movement

SEJARAH PEMBERONTAKAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DI ACEH TAHUN 1976-2005

Murni Wahyuni*, Isjoni, Bedriati Ibrahim*****

Email: Murniwahyun@gmail.com (085278240371), Isjoni@yahoo.com, Bedriati.ib@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Riau

Abstrak: GAM yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 merupakan bentuk kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah pusat yang menganut paham sentralisme. Tidak hanya itu, Aceh turut mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Aceh turut menyumbangkan kontribusi yang cukup besar, bahkan disebut sebagai daerah modal Republik Indonesia oleh Soekarno. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan Aceh sebelum terjadinya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, untuk mengetahui proses pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka tahun 1976-2005, untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dan untuk mengetahui keadaan Aceh pasca diadakannya perjanjian perdamaian. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dimana data dikumpulkan melalui Studi Pustaka, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan metode penulisan sejarah. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul proposal sampai dengan selesainya revisi terakhir skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor ekonomi, kebudayaan dan kekecewaan Aceh lah yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan. Dalam perkembangan selanjutnya pemberontakan menelan banyak korban terutama rakyat sipil. Selanjutnya, tiap presiden memiliki cara mereka masing-masing untuk menumpas pemberontakan ini. Tahap akhir yang menumpas pemberontakan ini adalah perjanjian damai atau MoU yang ditandatangani di Helsinki dengan perdebatan panjang yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2005. Selain itu, bencana alam tsunami juga memiliki andil dalam perdamaian ini karena dianggap sebagai pendorong dalam rencana perdamaian. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam 29 tahun pemberontakan Aceh untuk mencapai keadilan diharapkan mampu terpenuhi dengan adanya MoU Helsinki.

Kata Kunci: Sejarah, Pemberontakan, Gerakan Aceh Merdeka

PENDAHULUAN

Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada.

Pada kasus Aceh, kecemburuan-kecemburuan sosial yang terjadi pada awal tahun 1970-an menjadikan kondisi Aceh menjadi beda. Ditemukannya sumber gas di Arun, lalu pembukaan sejumlah kilang raksasa lainnya di zona industri Lhoksumawe adalah faktor lain yang tak bisa dipisahkan dari warna konflik setempat. Jumlah pengangguran yang membengkak seiring tumbuhnya generasi pencari kerja baru di Aceh makin menyuburkan kondisi kecemburuan sosial itu.

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang sangat kuat, serta menjunjung adat mereka yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Identitas sosio-kultural yang begitu kuat inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh menuntut diterapkannya identitas keislaman masyarakat Aceh. Faktor selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Orde Baru yang ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Aset-aset sumber daya alam di Aceh dieksploitasi dalam konteks pembangunan ini.

Hubungan pusat-daerah yang tidak harmonis inilah yang menjadi pusat dari dua gerakan separatis utama di Aceh. Setelah Pemberontakan DI/ TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat kembali terefleksikan dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode historis. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau yang lebih dikenal dengan pola-pola.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan metode sejarah mengandung seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tesis.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer yaitu si peneliti (penulis) yang secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian yang dituliskan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sekunder yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu atau lebih yang telah lepas dari kejadian aslinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi perpustakaan, dokumentasi dan wawancara. Untuk memperjelas tentang kegiatan yang dilakukan penulis dalam metodologi penelitian, maka penulis akan menetapkan antara lain: sasaran, tempat dan waktu penelitian yang akan diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Aceh Sebelum Adanya Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Dimulai sejak pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi Aceh sudah diwarnai dengan berbagai konflik. Akar permasalahan konflik di Aceh didasari banyaknya kekecewaan-kekecewaan yang terus dialami oleh rakyat Aceh. Dalam persoalan konflik konteks struktur dan fungsi kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan harus diperhatikan karena masyarakat sebagai suatu unit entitas akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan konflik.

Semasa Agresi Belanda I dan II, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang tidak dikuasai Belanda. Aceh mengambil peran penting pada saat Agresi Militer Belanda II, saat itu pemerintahan di Bukittinggi tumbang, dan Acehlah yang mengambil peranan sebagai pemerintah pusat, tepatnya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Ketika Soekarno datang ke Aceh menemui Daud Beureuh. Soekarno meminta agar rakyat Aceh turut mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Daud Beureuh pun setuju. Rakyat Aceh turut menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.

Soekarno berjanji akan menerapkan syariat Islam di Aceh setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Namun, janji ini tidak pernah terpenuhi. Aceh tidak diberi otonomi daerah dengan penerapan syariat Islam, justru Aceh dimasukkan kedalam Provinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh, seorang ulama terkenal dengan atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosoewirjo.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh

A. Faktor Ekonomi

Dari sisi ekonomi, masalah eksploitasi ekonomi menjadi akar konflik yang patut dicermati. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya ladang gas alam Arun. Beroperasinya kilang gas Arun tahun 1977 di Lhoksumawe, ibukota Aceh Utara, menjadikan Aceh sebagai kawasan industri strategis. Arti strategis bertambah dengan berdirinya pabrik pupuk Iskandar Muda dan Pabrik Pupuk Asean, serta pabrik kertas PT. Kraft. Kekayaan alam yang terus digali dan beroperasinya perusahaan-perusahaan nasional membuat Aceh mampu menyumbangkan devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran pada tahun 1993 dari 6,644 trilyun penghasilan bersih negara dari sektor migas, hanya 453,9 milyar yang kembali ke Aceh. Kekayaan daerah tersebut terserap ke pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan ke Aceh untuk keperluan pembangunan sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain.

B. Faktor Budaya

Aceh sejak dahulu merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain memegang teguh prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Aceh merupakan kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1873, ditambah lagi Aceh juga memiliki identitas regional, etnis dan nasionalisme yang kuat.

Keinginan Aceh yang begitu kuat untuk melaksanakan syariat Islam mendapat tentangan keras dari pemerintah Pusat. Pemerintah pusat tidak ingin Indonesia yang baru merdeka menjadi terpecah karena penerapan negara Islam. Pikiran ini justru sangat bertentangan bagi rakyat Aceh, yang menganggap justru pemerintahan Soekarno tidak sesuai lagi dengan sila pertama Pancasila yang menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaan tersebut seperti telah dijelaskan diatas, dianggap sebagai ancaman pada masa *nation building* di masa pemerintahan Soekarno dan ideologi pembangunan yang sentralistik pada masa pemerintahan Soeharto.

C. Faktor Kekecewaan-kekecewaan yang Dirasakan Masyarakat Aceh

Presiden Soekarno menjanjikan diterapkannya syariat Islam di Aceh setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Akan tetapi, janji tersebut tidak pernah terpenuhi. Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat islam seperti yang telah dijanjikan, tetapi Aceh justru dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan-kekecewaan ini menghasilkan pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) pada tahun 1953.

Selain itu, Sekalipun diberikan status Daerah Istimewa Aceh, masyarakat Aceh sendiri sama sekali tidak merasakan keistimewaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat tidak memfasilitasinya dengan perangkat hukum, perundang-undangan, dan peraturan maupun penyediaan anggaran yang memadai untuk merealisasikan keistimewaan tersebut. Akibatnya keistimewaan tersebut tidak lebih hanya merupakan simbol kosong.

3. Proses Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 1976-2005

A. Awal Pembentukan

Hasan Tiro membangun markas GAM pertama kali di hutan Pantan Weng di Pidie, yang kemudian dipindahkannya ke tempat yang lebih aman di Bukit Cokan, masih di kabupaten Pidie. Di Bukit Cokan Gle

Saba, Tiro, Pidie, 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh. Tanggal ini sengaja ia pilih untuk menolak catatan sejarah versi Belanda. Menurut catatan sejarah tersebut pada tanggal 3 Desember 1911 Belanda telah menembak mati Tengku Cik Di Tiro, pejuang Aceh. Oleh Belanda sejarah kematian ini diartikulasikan sebagai salah satu tanda berakhirnya perang Aceh yang berlangsung sejak 1873. Oleh karenanya Hasan Tiro memilih tanggal 4 Desember 1976 sebagai kebangkitan kembali dan kelanjutan dari eksistensi Aceh. Dimata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda.

B. Tahap Awal Pemberontakan (1977-1979)

Pada awal kemunculannya, gerakan ini hanya mendapat dukungan kecil Hasan Tiro, yang pada waktu itu adalah seorang pebisnis lokal dan sebelumnya pernah menjadi wakil Darul Islam di PBB, mendirikan GAM pada Oktober 1976. Dia mengecam kekuasaan kolonial “Jawa” dan khususnya eksploitasi sumber-sumber daya alam Aceh serta penggunaan kekuatan militer untuk menjaga kontrol. Hanya dengan beberapa ratus pendukung, gerakan itu mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera pada 1977, sesekali menyebarkan propaganda, dan mengibarkan bendera GAM di berbagai lokasi, tetapi hanya sedikit melakukan tindakan militer. Kelompok ini terutama terdiri dari para intelektual, teknokrat dan pebisnis.

C. Tahap Kedua Pemberontakan (1989-1999)

Sepanjang tahap konflik kedua yang bermula sejak pertengahan 1980-an, para pemimpin GAM di Malaysia merekrut ratusan orang Aceh yang tinggal di Aceh dan Malaysia untuk menjalani pelatihan militer di Libya. Setelah kembali ke Aceh pada 1989, mereka melancarkan serangkaian serangan gerilya. GAM muncul lagi, dan dipersenjatai lebih baik dan melancarkan serangan yang lebih gencar meski tetap relatif kecil, dengan anggota inti beberapa ratus pejuang aktif.

Tahap kedua, pemimpin yang bergabung selama fase ini adalah Sofyan Dawood (komandan GAM di Pase, Aceh Utara) dan Ishak Daud (yang menjadi juru bicara GAM di Peureulak, Aceh Timur).

Namun, gerakan gerilya ini kembali berhasil dilumpuhkan oleh militer dan Aceh pun dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1992. Kebijakan operasi militer yang terus berlanjut hingga 1998 ini berdampak pada pelanggaran HAM berat, sehingga kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia semakin dalam.

D. Tahap Ketiga Pemberontakan (1999-2005)

Bentrokan terus terjadi dan kesatuan-kesatuan polisi/ militer melakukan operasi pembersihan ke desa-desa yang dicurigai menjadi sarang GAM. ABRI meningkatkan jumlah pasukannya mendekati 6.000, membalik kebijakan penarikan pasukan non-organik dari daerah tersebut.

Pemicu eskalasi konflik selama masa transisi demokrasi adalah operasi militer kedua pada tahun 1999. Operasi militer yang diputuskan dibawah tekanan TNI terhadap pemerintah sipil Indonesia. TNI menyadari kekosongan operasi militer telah dimanfaatkan oleh GAM untuk merekrut dan mereorganisasi gerakannya. Pada gilirannya, perang pecah kembali tanpa bisa dihindari. Kedua belah pihak pada dasarnya menggunakan *coercive action* atau “*contending strategy*” (strategi berkelahi).

Abdurrahman Wahid mendekati GAM dan mencapai suatu kesepakatan mengenai “jeda kemanusiaan”. Dibawah mediasi Henry Dunant Centre di Swiss, kesepakatan itu ditandatangani pada 12 Mei 2000 dalam suatu pertemuan yang dihadiri Hasan Tiro, pemimpin GAM di pengasingan. “Jeda kemanusiaan” semula dilihat sebagai kemenangan gemilang Abdurrahman Wahid karena dilakukan hanya tiga bulan setelah ia menjadi presiden.

Pemerintah Megawati juga mencapai kesepakatan baru dengan GAM. Suatu kesepakatan penghentian permusuhan ditandatangani pada 9 Desember 2002.

Pada masa SBY, Pemerintah Indonesia meminta CMI (*Crisis Management Initiative*) pimpinan Marthi Atiisari untuk menjadi mediator negosiasi damai. Negosiasi meja pun mulai berjalan melalui *good office* CMI. Proses negosiasi berjalan alot namun produktif. Karena masing-masing pihak berkomitmen menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

4. Upaya Pemerintah dalam Menumpas Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka

Konsep dari Joseph Nye yang menunjukkan bahwa *hard power* mengarah kepada penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik. Pola ini dipakai oleh Presiden Megawati saat menetapkan Darurat Militer untuk Aceh. Sedangkan *soft power* merupakan penggunaan cara-cara dialogis untuk menyelesaikan konflik. Pola ini pula yang dipakai oleh Presiden SBY untuk menyelesaikan konflik Aceh hingga berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pola Presiden	<i>Hard Power</i>	<i>Soft Power</i>
Soeharto	Kebijakan DOM	-
Habibie	-	Pancabutan DOM
Abdurrahman Wahid	-	Jeda Kemanusiaan
Megawati Soekarnoputri	- Darurat Militer - Darurat Sipil	CoHA atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan
Susilo Bambang Yudhoyono	-	Perundingan di Helsinki

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya setiap presiden yang pernah memimpin di Indonesia memiliki cara mereka masing-masing dalam mengatasi konflik yang ada di Aceh, baik itu dengan cara kelembutan atau cara kekerasan. Namun, jika mengabaikan banyak aspek seperti keamanan dan keselamatan, semuanya itu berdampak kepada masyarakat.

5. Kondisi Aceh Pasca Diadakannya Perjanjian Perdamaian (2005-Sekarang)

Pasca MoU, walaupun sudah ada kesepakatan perjanjian perdamaian di Aceh, nyatanya kesejahteraan rakyat Aceh belum juga tercapai. Sekarang sepuluh tahun pasca perdamaian, masih ada poin perjanjian yang belum terlaksana dan masih dalam pembahasan. Menurut narasumber, MoU adalah keputusan yang terbaik, namun sayang sampai sekarang masih belum ada kejelasannya. Dalam dua tahun dijanjikan penyelesaian MoU Helsinki yang turun kepada UU PA, sekarang sudah sepuluh tahun, yang dijanjikan masalah kewenangan daerah masih belum terlaksana. Untuk mengatasi hal ini sudah pasti harus ada kejelasan dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkannya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sebagaimana fakta sejarah, konflik Aceh bermula pada tahun 1976. Awal penghitungan dimulai saat dideklarasikannya Aceh Merdeka (AM) oleh seorang pria bernama Hasan Muhammad atau lebih dikenal sebagai Hasan Tiro di Gunung Halimun, Pidie, 4 Desember 1976. Sejak itu, militer Republik Indonesia (RI) mulai memfokuskan pemburuan terhadap Hasan bersama pengikutnya yang menginginkan Aceh menjadi wilayah independen (negara) yang terpisah dari RI.

Pada akhirnya, konflik bersenjata tidak dapat dihindari. Propaganda dan aksi gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah kepemimpinan Hasan Tiro membuat pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) bereaksi keras dengan menggelar operasi militer besar-besaran untuk menumpas separatisme. Sejak 1989, operasi masif untuk menumpas separatis GAM mulai dikobarkan.² Korban pun terus berjatuhan. Kebanyakan dari kalangan rakyat Aceh.

Rekomendasi

1. Kepada pemerintah, pemerintah diharapkan lebih cerdas dalam menanggapi masalah konflik karena rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, dan banyak agama serta tersebar diberbagai kepulauan yang ada di Indonesia ini sangat rentan dengan yang namanya perpecahan. Pemerintah harus tetap memegang teguh semboyan NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Juga diharapkan tidak pilih kasih atau menganaktirikan provinsi manapun yang ujung-ujungnya akan mengancam kesatuan Indonesia.
2. Kepada masyarakat, masyarakat diimbau untuk saling toleransi dan diharapkan menjauhkan diri dari yang namanya tindakan SARA. Sekalipun ingin menyuarakan keadilan hendaklah dilakukan dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan, karena yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Rasa saling percaya dan saling membutuhkan dengan pemerintah diharapkan bisa memupuk nasionalisme dan menjauhkan diri dari separatisme yang pernah terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, nyatanya hanya menorehkan luka dalam demi sebongkah keadilan yang didapat melalui jalan kekerasan.
3. Kepada para pelaku/ aktor konflik/ separatisme, diharakan agar tidak memilih jalan anarkisme sebagai cara memperoleh sebuah keadilan diatas kepentingan pribadi yang menyangkut hidup orang banyak dan merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Antje Missbach. 2012. *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Cornelis Van Dijk. 1993. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Dewi Fortuna Anwar, dkk. 2004. *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Djumala Darmansyah. 2013. *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamid Awaluddin. 2008. *Damai di Aceh; Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*. Jakarta: Penerbit CSIS
- J.R.G Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo
- Jacques Bertrand. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Kompas. 2001. *Demokrasi, kekerasan, disintegrasi: Merangsang Pemikiran Ulang Keindonesian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moh. Soleh Isre. 2003. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Munawar A. Djalil. 2009. *Hasan Tiro Berontak: Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realita Sosial*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher
- Novri Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Ruslan, dkk. 2008. *Mengapa Mereka Memberontak?: Dedengkot Negara Islam Indonesia* Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suparlan Parsudi. 1985. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Akademika Pressindo

Syamsuddin Haris. 1999. *Indonesia Di Ambang Perpecahan?: Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor-timur*. Jakarta: Erlangga

Syamsul Hadi dan Andi Widjajanto, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.